



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029**

**DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN &  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAGETAN**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	27
2.1.5 Mitra Kerja Perangkat Daerah .....	28
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah .....	28
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah .....	28
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	28
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah .....	28
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	38
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	43
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	43
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	46
4.2 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Mengacu Pada Nomenklatur .....	62
4.3 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah .....	106
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	110
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	114
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepenuhnya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perencanaan yang memastikan konsistensi antara perencanaan sektoral dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD), penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra memegang peranan penting dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Keterkaitan dengan RPJMD  
Dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD.
2. Keterkaitan dengan Renstra K/L  
Dokumen Renstra K/L harus tetap dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dimana selain sasaran Renstra harus mengacu pada RPD juga tetap harus selaras dengan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra K/L.
3. Keterkaitan dengan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan  
Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja.
4. Keterkaitan dengan Penganggaran

Perubahan Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA – PD, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA – PD sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD.

5. Keterkaitan dengan Evaluasi

Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen Renja.

Penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan sosial dalam lima tahun ke depan.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. PP No. 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
14. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Paraf Koordinasi Bag. Hukum Pemrakarsa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban *Kekerasan* (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 56)
29. Peraturan Bupati Magetan Nomer 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
31. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/403/Kept./403.013/2021 Tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.
32. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/267/Kept./403.013/2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang  
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan dengan Renja Perangkat Daerah
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan  
Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
- 1.3. Maksud dan Tujuan  
Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
- 1.4. Sistematika Penulisan  
Menguraikan sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 serta garis besar isi dokumen

### **Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah
  - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  
Memuat macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan  
Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan  
Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
  - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah  
Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja
  - 2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah  
Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah  
Mengemukakan permasalahan - permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

#### 2.2.2 Isu Strategis

Memuat informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani oleh Perangkat Daerah melalui Renstra Perangkat Daerah

### **Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  
Memuat keterkaitan antara tujuan RPJMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  
Berisi rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029  
Berisi rumusan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

### **Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output  
Berisi program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output Kinerja Perangkat Daerah
- 4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur  
Berisi Rencana program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif Perangkat Daerah
- 4.3. Subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah  
Uraian sub-kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  
Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
- 4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Berisi target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

### **Bab V Penutup**

Memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan terdiri atas :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
  - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia; membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Bidang Keluarga Berencana; membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala Dinas

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sekretariat

### a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- 2) penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 3) pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- 4) pengelolaan urusan kepegawaian;
- 5) pengelolaan urusan keuangan;
- 6) pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7) pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- 8) pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat secara struktural membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, yaitu:

- (1) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:
  - (a) melaksanakan urusan surat-menyurat;
  - (b) membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - (c) menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
  - (d) melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
  - (e) mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
  - (f) melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
  - (g) menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
  - (h) mengurus kesejahteraan pegawai;
  - (i) merencanakan pengelolaan arsip; dan
  - (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Tugas Sub Bagian Keuangan adalah:
  - (a) mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
  - (b) menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
  - (c) melaksanakan tata usaha keuangan;
  - (d) memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
  - (e) melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
  - (f) melaksanakan tata usaha gaji pegawai;

- (g) menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- (h) menyusun laporan keuangan;
- (i) melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran; dan
- (j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

a. Tugas

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, melaksanakan kebijakan teknis dibidang advokasi, penyuluhan dan penggerakan serta pendayagunaan sumber daya manusia di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia;
- 2) perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- 3) pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- 4) pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- 7) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- 9) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- 10) pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- 11) pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga IMP (PPKBD dan Sub PPKBD);

- 12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- 14) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 15) pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan pedayagunaan sumber daya manusia; dan
- 16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### D. Bidang Keluarga Berencana

##### a. Tugas

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana.

##### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program jaminan, perumusan kebijaksanaan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana ;
- 2) perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi;
- 3) pelaksanaan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta;
- 4) menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan Keluarga Berencana;
- 5) pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana;
- 6) penyusunan kebijakan, strategi, dan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan masalah reproduksi;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 8) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi;
- 9) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah reproduksi; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

##### a. Tugas

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat.

##### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan ketahanan keluarga;
- 2) penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) peningkatan dan pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan instansi lain dan lembaga / organisasi kemasyarakatan;
- 4) pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 5) penyampaian laporan kegiatan pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha;
- 6) penyusunan pedoman pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia;
- 7) pelaksanaan program ketahanan balita, remaja, dan lansia; dan
- 8) pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### F. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

##### a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengendalian program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender.

##### b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan produk hukum dan pedoman teknis program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 2) pengumpulan bahan dan atau data basis untuk penyusunan rencana operasional dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 3) pelaksanaan dan fasilitasi program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 4) pengoordinasian program/kegiatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 5) pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 6) pengintegrasian upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 7) pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak;
- 8) pembinaan dan koordinasi penyelesaian korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak;

- 9) pelaksanaan analisa dan penilaian program/kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender;
- 10) pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- 11) penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengarusutamaan gender; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

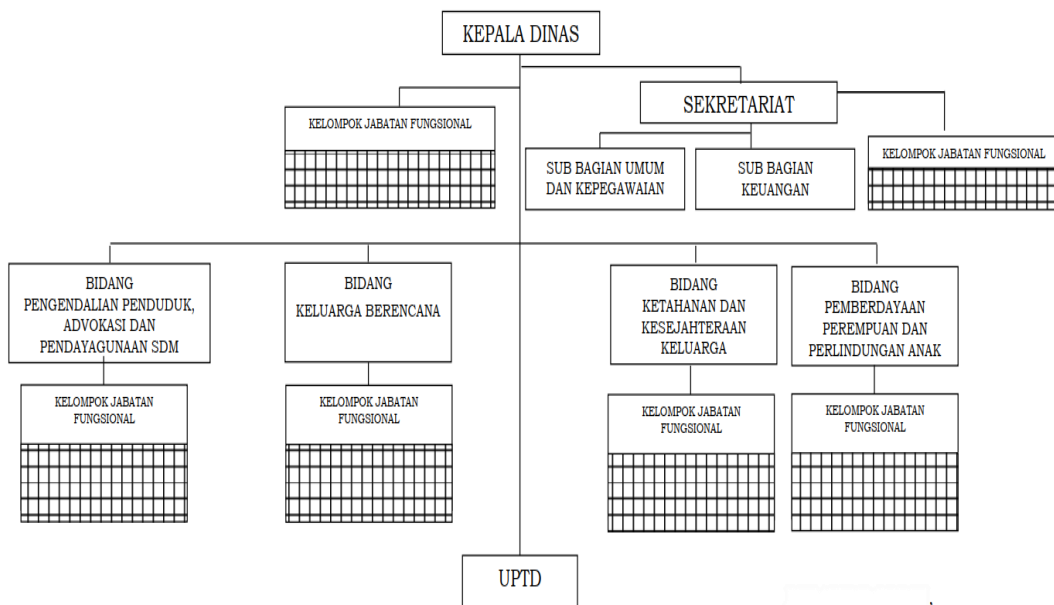
**G. Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri

**H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan serta melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

**Struktur Organisasi Perangkat Daerah**



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### I. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PPKB PP dan PAKabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

#### 1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)	Keterangan	
			L	P
1.	IV/e	-	-	
2.	IV/d	-	-	
3.	IV/c	-	-	-
4.	IV/b	1	1	0
5.	IV/a	5	2	3
6.	III/d	4	0	4
7.	III/c	1	0	1
8.	III/b	1	1	0
9.	III/a	12	5	7
10.	II/d	1	1	0
11.	II/a	5	2	3
	Jumlah	30	12	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PPKB PP dan PA Kab Magetan*

#### 2. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

**Tabel 2.2**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
				L	P
1.	Kepala	II.b	0	0	0

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
				L	P
2.	Sekretaris	III.a	1	1	0
3.	Kepala Bidang	III.b	4	1	3
4.	Kasubag	IV.a	0	0	0
5.	Fungsional	IV.a	8	2	6
6.	Staf/Pelaksana	-	17	8	9
	Jumlah		30	12	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PPKB PP dan PAKab Magetan*

### 3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Strata 2 (S2)	3	1	2
2.	Strata 1 (S1)	21	7	14
3.	Sarjana Muda (D3)	2	0	2
4.	SLTA	4	4	0
	Jumlah	30	12	18

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Dinas PPKB PP dan PA Kab Magetan*

### 4. Jumlah ASN yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

**Tabel 2.4**  
**Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Diklatpim Tk. II	-		

2.	Diklatpim Tk. III	5	2	3
3.	Diklatpim Tk.IV	9	4	5
	Jumlah	14	6	8

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas PPKB PP dan PA Kab Magetan*

## **II. Sarana dan Prasarana (Aset)**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas PPKB PP dan PAKabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

### **Daftar Sarana dan Prasarana Dinas PPKB PP dan PAKab Magetan**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Bangunan Kantor (2 lantai)	Unit	1
2.	Balai penyuluhan KB/UPTD PKS	Unit	18
3.	Kendaraan dinas roda 4	unit	8
4.	Kendaraan roda 2	Unit	106
5.	Lemari Kayu	Unit	15
6.	Filling Cabinet Besi/Metal	Unit	30
7.	Rak Besi/Metal	Unit	25
8.	Filling Besi/Metal	Unit	10
9.	Brankas	Unit	1
10.	Meja Kayu	Unit	4
11.	Meja Rapat	Unit	82
12.	Mesin Ketik	Unit	2
13.	Lemari Kaca	Unit	38
14.	LCD Proyektor	Unit	50
15.	Layar proyektor	Unit	29
16.	Kursi Kayu	Unit	3
17.	Kursi Rapat	Unit	236

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
18.	Kursi Tamu	set	3
19.	Kursi Biasa	Unit	360
20.	Meja Komputer	Unit	12
21.	Meja Staf	Unit	74
22.	Sofa	Unit	20
23.	AC Split	Unit	8
24.	Kipas Angin	unit	45
25.	Exhause Fan	Unit	19
26.	Televisi	Unit	2
27.	sound System	Unit	2
28.	Kamera	Unit	3
29.	Podium	Unit	1
30.	PC. Unit	Unit	48
31.	Laptop	Unit	37
32.	Tablet PC	Unit	21
33.	Printer	Unit	49
34.	Tablet Huawei	Unit	19
35.	Tablet Samsung	Unit	40
36.	Bangunan Baleho/Reklame	Unit	4
37.	Meja Kerja Pejabat	Unit	21
38.	Kursi Kerja Pejabat	Unit	21

*Sumber : Pengurus Barang Dinas PPKB PP dan PA Kab Magetan ini.*

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut. Dinas PPKB PP dan PA telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya selama 5 tahun terakhir. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan kinerja selama tahun

2020-2024 ini telah dievaluasi sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Dinas PPKB PP dan PA periode 2020-2024 merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Dinas PPKB PP dan PA pada periode selanjutnya.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>a</b>	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			√	0,2	0,2	0,19	-	-	0,168	0,84	0,62	-	0,58	116,0	-220,0	-126,3		
2	Total Fertlity Rate (TFR)			√	2,16	2,15	2,14	2,09	2,085	2,1	2,13	2,1	2,09	1,99	102,8	100,9	101,9	100,0	104,6
3	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP)			√	20,3	20,5	20,8	24,71	-	23,12	24,89	24,7	24,79	-	113,9	121,4	118,8	100,3	-
4	Persentase Wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)		√		8	7,8	7,8	7,5	-	9,3	8,15	6,96	5,15	-	83,8	95,5	110,8	131,3	-
5	Tingkat prevalensi kontrasepsi (CPR)		√		76,7	76,9	77,1	77,3	-	72,98	74,5	71,86	71,29	72,15	95,1	96,9	93,2	92,2	-
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			√	-	-	-	-	64,5	-	-	-	-	65,92	-	-	-	-	102,2
<b>b</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																		
1	Indek Peberdayaan Gender (IDG)			√	61,36	61,37	61,38	70,51	72,1	66,68	70,5	71,45	72,72	70,7	108,7	114,9	116,4	103,1	98,1
2	Partisipasi angkatan kerja perempuan		√		78,6	78,6	78,61	78,6	81,75	87,24	81,13	81,64	80,8	80,87	111,0	103,2	103,9	102,8	98,9
3	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintah		√		4,77	4,78	4,79	4,8	4,79	4,31	2,49	4,56	4,57	5,25	90,4	52,1	95,2	95,2	109,6
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		√		7,67	8,67	9,67	10,67	10,67	11,11	8,88	15,55	15,55	13,33	144,9	102,4	160,8	145,7	124,9

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Pembangunan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Rasio KDRT			√	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02	0,06	0,03	0,02	0,0189	0,014	100,0	140,0	150,0	105,5	130,0
6	Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)			√	680	690	700	710	700	826,1	690	700	710	642,59	121,5	100,0	100,0	100,0	91,8
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			√	77,01	77,25	77,55	77,91	-	63,7	79,5	86,2	87,23	-	82,7	102,9	111,2	112,0	-
8	Persentase Anak yang tidak terpenuhi Hak nya			√	-	-	-	-	0,837	-	-	-	-	0,623	-	-	-	-	125,6

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.090.361	0	0	0	0	347.914.886	0	0	0	0	92,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	153.071.750	0	0	0	0	147.767.628	0	0	0	0	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
3	Program Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualistas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan Kb	808.070.000	0	0	0	0	626.541.500	0	0	0	0	77,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
4	Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	25.000.000	0	0	0	0	21.814.900	0	0	0	0	87,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
5	Program Pengendalian Penduduk	3.163.460.800	0	0	0	0	2.898.710.545	0	0	0	0	91,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
6	Program Generasi Berencana	37.600.000	0	0	0	0	37.067.000	0	0	0	0	98,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
7	Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	25.000.000	0	0	0	0	23.681.000	0	0	0	0	94,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
8	Program Advokasi Dan Pendayaguna an Sumberdaya Lini Lapangan	553.750.000	0	0	0	0	553.750.000	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
9	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	58.080.000	0	0	0	0	55.462.400	0	0	0	0	95,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
10	Program Penguatan Kelembagaan Pug Dan Anak	83.120.000	0	0	0	0	76.592.347	0	0	0	0	92,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
11	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
12	Program Keluarga Berencana	2.107.498.650	0	0	0	0	1.639.896.664	0	0	0	0	77,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
13	Program Pelayanan Kontrasepsi	63.483.150	0	0	0	0	59.849.350	0	0	0	0	94,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
14	Program Kesehatan Reproduksi	41.950.500	0	0	0	0	40.699.300	0	0	0	0	97,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
15	Program Bina Ketahanan Keluarga	149.440.000	0	0	0	0	148.388.575	0	0	0	0	99,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
16	Belanja Tidak Langsung	2.656.231.993	0	0	0	0	2.416.309.740	0	0	0	0	90,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0	62.125.000	62.502.700	138.731.400	170.000.000	0	61.627.250	61.532.700	134.925.600	162.182.490	0,00%	99,20%	98,45%	97,26%	95,40%	48,37%	46,44%
2	Program Perlindungan Perempuan	0	88.750.000	54.100.000	182.642.950	300.000.000	0	79.752.642	52.355.400	167.863.641	282.477.100	0,00%	89,86%	96,78%	91,91%	94,16%	87,61%	84,85%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	0	58.750.000	61.830.000	83.600.000	100.000.000	0	55.529.150	58.134.230	80.175.600	94.338.000	0,00%	94,52%	94,02%	95,90%	94,34%	20,02%	20,09%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4	Program Perlindungan Khusus Anak	0		451.800.000		200.000.000	0		222.506.099		191.591.050	0,00%	0,00%	49,25%	0,00%	95,80%	-33,33%	-33,33%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	4.451.676.698	4.475.832.167	4.239.767.671	5.415.787.500	0	3.991.826.462	4.395.186.165	4.139.574.021	5.215.654.997	0,00%	89,67%	98,20%	97,64%	96,30%	7,67%	10,09%
6	Program Pengendalian Penduduk	0	345.950.000	298.225.950	693.522.050	1.007.622.300	0	340.137.459	287.849.282	660.527.791	977.102.949	0,00%	98,32%	96,52%	95,24%	96,97%	54,68%	54,01%
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	0	6.486.680.000	5.563.591.398	6.974.840.000	5.959.601.137	0	5.329.143.868	5.148.836.496	6.401.112.483	5.569.527.444	0,00%	82,16%	92,55%	91,77%	93,45%	-1,14%	2,65%
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0	1.061.074.600	3.509.312.500	3.942.080.100	4.128.600.000	0	1.030.269.750	2.392.987.850	3.926.659.150	4.082.797.150	0,00%	97,10%	68,19%	99,61%	98,89%	82,60%	66,78%

## **I. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

### **a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Ada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan penduduk di kabupaten Magetan sangat fluktuatif. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021. Hal ini karena mulai tahun 2020 BPS mulai menggunakan data laporan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, sehingga pada tahun tersebut terlihat perubahan yang signifikan.

### **b. Total Fertility Rate (TRF)**

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Nilai TFR ideal untuk menjaga pertumbuhan penduduk yang ideal adalah 2,1 yang berarti setiap wanita selama masa suburnya rata-rata memiliki 2,1 anak. Nilai TFR yang terlalu tinggi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang cepat sedangkan TFR yang terlalu rendah menyebabkan penurunan jumlah penduduk.

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, nilai TFR berhasil diturunkan dari target 2,16 pada tahun 2020 dan tercapai sebesar 1,99 pada tahun 2024.

Faktor yang mendorong keberhasilannya adalah penggunaan dan efektifitas kontrasepsi (CPR dan Unmet need), usia kawin pertama wanita < 20 tahun, persentase penduduk miskin, persentase wanita tamat SMA. Strategi yang bisa diupayakan adalah mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya program KB dan meningkatkan pelayanan KB, selain juga melaksanakan koordinasi dan advokasi dengan linsek terkait untuk efektifitas intervensi.

### **c. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita**

Target Rata rata usia kawin pertama wanita pada tahun 2020 target sebesar 20,30 relaisainya sebesar 23,12. Pada tahun 2023 target sebesar 24,71 relaisainya tercapai sebesar 24,79. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama wanita disebabkan oleh beberapa upaya pendukung. Upaya pertama yaitu adanya peningkatan kesadaran masyarakat yang diperoleh dari berbagai edukasi tentang pentingnya menikah pada usia yang matang. Upaya kedua yaitu semakin intensifnya pelaksanaan Program Pemerintah melalui Generasi Berencana (GenRe) yang terdiri dari PIK Remaja (PIK-R), Saka Kencana di setiap Desa/Kelurahan. Upaya selanjutnya adalah melalui optimalisasi partisipasi sekolah pada kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), serta kegiatan pada Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), kemudian dengan adanya dukungan dari para pemangku kebijakan dan stakeholder melalui penerapan regulasi tentang batas minimal usia perkawinan.

**d. Persentase Wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun (SDGs)**

Persentase Wanita berusia 20 – 24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 20 tahun pada tahun 2020 target sebesar 8,00% relaisasinya sebesar 9,30% sedangkan tahun 2023 target sebesar 7,50% relaisasinya sebesar 5,15%. Indikator ini merupakan indikator negatif dimana semakin kecil nilai capaiannya maka semakin bagus kinerjanya.

Belum tercapainya indikator pada tahun 2020 dapat disebabkan oleh kendala-kendala seperti masih adanya praktik perkawinan dini akibat faktor budaya, ekonomi, dan latar belakang pendidikan keluarga, serta adanya kesenjangan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Namun demikian, capaian target terus mengalami perbaikan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 melalui berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu peningkatan sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dan bahaya perkawinan anak melalui sekolah, PIK-R, maupun kegiatan GenRe. Di samping itu, Pemerintah juga mengupayakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta peningkatan akses pendidikan perempuan sehingga banyak remaja putri menunda pernikahan untuk melanjutkan studi dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih matang dan sejahtera.

**e. Tingkat prevalensi kontrasepsi (mCPR)**

M CPR adalah singkatan dari Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Tingkat Prevalensi Kontrasepsi Modern, yang merupakan persentase wanita usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada saat data dikumpulkan. Indikator ini mengukur sejauh mana masyarakat telah menggunakan alat atau cara kontrasepsi modern seperti pil, suntik, IUD, implan, atau sterilisasi untuk menunda, mengatur jarak, atau membatasi kehamilan. Selama 5 tahun terakhir capaian mCPR Kabupaten Magetan mengalami naik turun dikisaran 71%-74% dan Pada tahun 2024 capaian mCPR Kabupaten Magetan adalah sebesar 72,15%.

Hal ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pemahaman dan informasi yang kurang tepat di masyarakat, hambatan sosial-budaya yang memengaruhi penerimaan beberapa jenis kontrasepsi modern, serta variasi kualitas layanan antarwilayah yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, keberhasilan mCPR turut didukung oleh peran aktif tokoh masyarakat dan keluarga dalam mendorong penerimaan serta penggunaan metode kontrasepsi modern.

**f. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pada Tahun 2024 capaian iBangga Kabupaten Magetan adalah 65,92 sehingga termasuk dalam kategori Pembangunan keluarga cukup baik (Berkembang).

Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

keharmonisan keluarga, kemandirian ekonomi, serta pengasuhan yang positif. Program-program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Generasi Berencana (GenRe) memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas interaksi antar anggota keluarga. Selain itu, penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro, serta akses bantuan sosial juga turut memperkuat kemandirian keluarga di Kabupaten Magetan.

Capaian ini semakin diperkuat dengan adanya sinergi lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan, yang memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan keluarga. Perubahan pola pikir masyarakat bahwa kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi juga dari aspek keharmonisan, komunikasi, dan kebahagiaan, menjadi modal penting dalam pencapaian target iBangga.

## **II. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

### **a. Rasio KDRT**

Jumlah capaian Angka Kekerasan pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan sebanyak 78 Kasus dengan Rasio Jumlah Kepala Keluarga (240.162) dibanding Jumlah Kekerasan dikali 100 % sama dengan 0,032%. Pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan sebanyak 38 Kasus dengan Rasio Jumlah Kepala Keluarga (250.541) dibanding Jumlah Kekerasan dikali 100 % sama dengan 0,014 % , dengan melihat capaian data tersebut Jumlah Korban Kekerasan mengalami penurunan. Hal tersebut didukung melalui advokasi diberbagai lembaga pendidikan, Masyarakat dan Lembaga masyarakat namun penurunan angka kekerasan tentunya harus diimbangi dengan kewaspadaan karena kasus kekerasan dapat seperti gunung es yang sewaktu – waktu dapat mencuat lebih besar.

### **b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2020 target sebesar 78,60 % dan realisasinya 87,64%, sedangkan pada tahun 2024 target sebesar 81,75 % dan realisasinya 80,87%, dari data diatas angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magetan mengalami penurunan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya pegawai wanita yang memasuki masa pensiun sehingga jumlah partisipasi angkatan kerja menurun.

### **c. Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Skor Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2021 target sebesar 690 point dan Realisasi 700 Point sedangkan pada Tahun 2023 target sebesar 700 point dan Realisasi 642,59 Point. Pada tahun 2023 ada penurunan point Kabupaten Layak Anak Kabupaten Magetan mendapatkan Penghargaan KLA Katergori Pratama, hal ini disebabkan perubahan indikator KLA yang belum disesuaikan oleh Pemerintah Daerah yang akan di Implemtasikan 2024 (Evaluasi KLA akan Pending/ditunda 1 Tahun di tahun 2024)

**d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah pada target pada tahun 2021 sebesar 4,78% realisasinya 2,49%, sedangkan pada pada target tahun 2022 sebesar 4,79% realisasinya 5,25%, sehingga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun belum memenuhi target. Hal ini disebabkan banyaknya PNS Perempuan yang Purna Tugas.

**e. Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD**

Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD dapat diketahui dari perbandingan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dan jumlah total anggota DPRD di Kabupaten Magetan. Dari data di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Target pada tahun 2021 target sebesar 7,68 % realisasinya 8,88 % sedangkan tahun 2024 target sebesar 10,67 % realisasinya 13,33 %. Hal ini menunjukkan peningkatan keikutsertaan perempuan dalam mengambil keputusan di lembaga legislatif.

**f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu ini dapat diketahui dari jumlah pengaduan atau laporan yang diselesaikan dan jumlah pengaduan secara keseluruhan. Berdasarkan data tahun 2020 target sebesar 77,01% dan realiasi sebesar 63,07% sedangkan tahun 2023 target sebesar 77,91% dan realisasinya 87,23%. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk Semua Pengaduan sudah dapat terlayani dengan adanya nomor WhatsApp Pengaduan.

**2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya diantaranya:

1. Perempuan dan anak korban kekerasan
2. Perempuan kepala keluarga (PEKKA)
3. Anak
4. Korban TPPO
5. Sekolah Ramah Anak
6. Pasangan Usia Subur (PUS)
7. Perempuan Seksual Aktif
8. Remaja
9. Keluarga Risiko Stunting (KRS)
10. Keluarga
11. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
12. Kelompok Kegiatan (Poktan)
13. Kelompok Ketahanan Keluarga
14. Kampung Keluarga Berkualitas
15. Masyarakat

### **2.1.5 Mitra Kerja Perangkat Daerah**

Dalam memberikan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan juga bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya :

1. Masyarakat melalui kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
3. Lintas Organisasi Perangkat Daerah
4. Fasilitas Kesehatan
5. Kepolisian
6. Kejaksaan
7. Pengadilan Agama
8. Pengadilan Negeri
9. Kementerian Agama
10. Puspa Larasati, Aisyiyah, Fatayat , muslimat, LKP3A Fatayat NU
11. Insan GenRe
12. Forum Anak
13. Badan Pusat Statistik (BPS)
14. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
15. Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
16. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB)

### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

Dalam memberikan pelayanan dan menjalankan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Dalam memberikan pelayanan dan menjalankan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan tidak memiliki kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas dan fungsi serta capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

- A. Urusan Penngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk yang berdampak pada laju ekonomi dan kualitas hidup masyarakat
  - Belum optimalnya kompetensi Tenaga Lini Lapangan sehingga

- berdampak pada kualitas
- Belum optimalnya pengelolaan Kampung KB dan RDK dimasing-masing Desa/Kelurahan
  - Belum optimalnya pengintegrasian pendidikan kependudukan melalui jalur formal, informal dan non formal
  - Belum optimalnya pemanfaatan data keluarga
  - Kurangnya tenaga medis terlatih untuk MOP, IUD, dan implan dikarenakan pelatihan CTU (Contraception Technology Update) hanya ±2 orang/tahun
  - Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
  - Rendahnya kesadaran perempuan seksual aktif untuk pemeriksaan dini kanker servik
  - Belum maksimalnya pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Magetan karena belum dilakukan penganggaran pada tahun 2025
  - Rendahnya partisipasi orangtua dalam pengasuhan dan pengawasan Remaja
  - Rendahnya peran ayah dalam pengasuhan anak
  - Masih Rendahnya kualitas Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)
  - Rendahnya peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting (GENTING)
  - Rendahnya partisipasi akseptor dalam Kelompok UPPKA
- B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Masih Rendahnya Pemahaman pemangku kebijakan dalam menyikapi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
  - Belum terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - Belum adanya Peraturan Daerah yang menekan Pernikahan Usia Anak
  - Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

### **2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil rewieu ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perumusan Isu Strategis Dinas PPKB PP & PA Kabupaten Magetan**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian penduduk berbasis data	Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk yang berdampak pada laju ekonomi dan kualitas hidup masyarakat	Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia	Ancaman jika bonus demografi tidak dikelola dengan baik	Adanya peringatan dini pengendalian penduduk secara berjenjang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah provinsi sampai dengan pemerintah daerah kabupaten/kota	Laju pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk belum merata	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan akan berdampak pada peningkatan capaian Indikator Program Bangga Kencana
Telah terbentuknya Tenaga Lini Lapangan di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan	Belum optimalnya kompetensi Tenaga Lini Lapangan		Kurangnya pengetahuan tentang Teknologi & Digitalisasi	Kompetensi dan kapasitas Tenaga Lini Lapangan yang bervariasi (ada yang sudah berpengalaman, tetapi masih ada yang kurang terlatih dalam hal konseling, komunikasi efektif, maupun penggunaan teknologi informasi)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang tidak seimbang dan keterbatasan kompetensi digital	Peningkatan kompetensi Tenaga Lini Lapangan di tingkat Kecamatan hingga Desa/Kelurahan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Telah terbentuknya Kelompok Kerja Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan (RDK) di masing-masing Desa/Kelurahan	Belum optimalnya pengelolaan Kampung KB dan RDK dimasing-masing Desa/Kelurahan			Kesenjangan antar wilayah di Indonesia terkait pengelolaan Kampung KB seperti kualitas dan kapasitas pengelola, integrasi lintas sektor, pendanaan dan keberlanjutan program kampung KB	Adanya kesenjangan capaian klasifikasi kampung KB di wilayah Kab/Kota di Jawa Timur, ada wilayah dengan capaian klasifikasi tertinggi dengan jumlah banyak tetapi masih ada juga wilayah dengan capaian klasifikasi terendah yang jumlahnya masih banyak	Peningkatan klasifikasi Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan
Telah terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan	Belum optimalnya pengintegrasian pendidikan kependudukan melalui jalur formal, informal dan non formal			Belum maksimalnya pengintegrasian materi kependudukan ke dalam proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan kearifan lokal	Adanya kesenjangan partisipasi pengelolaan SSK antar Kab/Kota di Jawa Timur	Terintegrasinya pendidikan kependudukan melalui jalur formal, informal dan non formal
Telah tersedianya data keluarga yang dapat dimanfaatkan	Belum optimalnya pemanfaatan data keluarga		Kualitas data tidak merata antar negara dan kurangnya pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan	Pemanfaatan data masih rendah di berbagai daerah	Keterpaduan data antar sektor masih lemah	Pemanfaatan data keluarga oleh lembaga dan lintas sektor

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
<p>- Jaringan PLKB/PKB dan kader KB desa di seluruh kecamatan</p> <p>- Dukungan program nasional BKKBN (Bangga Kencana)</p> <p>- Data keluarga melalui Pendataan Keluarga (PK)</p> <p>- Dukungan regulasi percepatan penurunan stunting &amp; penguatan Kampung KB</p> <p>- Dukungan tokoh masyarakat &amp; agama untuk advokasi KB</p> <p>- Adanya program deteksi dini kanker serviks &amp; payudara di desa dan dinas kesehatan</p>	<p>Kurangnya tenaga medis terlatih untuk MOP, IUD, dan implan dikarenakan pelatihan CTU (Contraception Technology Update) hanya ±2 orang/tahun</p>		<p>Krisis tenaga kesehatan global &amp; perubahan iklim mempengaruhi ketahanan pangan &amp; kesehatan reproduksi</p>	<p>Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, target penurunan TFR, percepatan penurunan stunting, kebijakan JKN</p>	<p>Disparitas layanan kesehatan dan hambatan akses KB akibat ketidakmerataan sumber daya</p>	<p>Peningkatan kapasitas tenaga medis KB melalui pelatihan CTU terjadwal &amp; berkelanjutan, termasuk penguatan jejaring layanan MKJP di faskes</p>
	<p>Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB</p>		<p>Kampanye kesetaraan gender &amp; perubahan iklim mempengaruhi kesehatan reproduksi</p>	<p>Rendahnya kesertaan KB pria, target penurunan TFR, percepatan penurunan stunting</p>	<p>Norma budaya membebaskan KB pada perempuan</p>	<p>Peningkatan partisipasi KB pria melalui edukasi berbasis komunitas dan integrasi promosi KB pria dalam kegiatan lintas sektor</p>
	<p>Rendahnya kesadaran perempuan seksual aktif untuk pemeriksaan dini kanker servik</p>		<p>kesehatan reproduksi, tren peningkatan penyakit tidak menular &amp; IMS</p>	<p>Program deteksi dini IVA/Pap smear &amp; SADARI</p>	<p>Akses layanan kesehatan reproduksi terbatas di wilayah tertentu, mobilitas penduduk</p>	<p>Peningkatan kesadaran &amp; perilaku pemeriksaan mandiri kesehatan reproduksi melalui KIE terintegrasi dan kolaborasi dengan faskes primer</p>

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
- Dukungan faskes						
Telah terbentuknya Bina Keluarga Lansia di setiap Desa/Kelurahan yang dapat mendukung terlaksananya Program Lansia Berdaya melalui Sekolah Lansia Tangguh	Belum maksimalnya pelaksanaan Sekolah Lansia Tangguh di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Magetan karena belum dilakukan penganggaran pada tahun 2025		Proyeksi persentase lansia di dunia akan meningkat dari 10% menjadi 17% di tahun 2050	Menurut proyeksi BPS tahun 2023, persentase penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2045 adalah 19,9%	Persentase jumlah lansia di Jawa Timur tertinggi ke dua se-Indonesia (16,02%)	Peningkatan Indeks Lansia Berdaya
Telah terbentuknya PIK-Remaja, Duta Genre, Bina Keluarga Remaja	Rendahnya partisipasi orangtua dalam pengasuhan dan pengawasan Remaja		Lingkungan yang kurang suportif sehingga memicu permasalahan kesehatan mental remaja	Ketidakhadiran ayah secara emosional berhubungan dengan meningkatnya kemungkinan remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko	- Banyaknya orangtua yang menerapkan pola pengasuhan permisif kepada remaja sehingga memicu remaja untuk melakukan perilaku negatif - Masih adanya kebiasaan masyarakat dalam acara-acara tertentu yang disertai dengan	Peningkatan Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
					acara minum-minuman keras	
Dilaksanakannya berbagai kegiatan untuk mendukung Gerakan Sekolah Bersama Ayah (SEBAYA) yaitu melalui kegiatan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama ke Sekolah dan Kelas Parenting (Pengasuhan) dengan para ayah sebagai sasaran/ peserta di sekolah	Rendahnya peran ayah dalam pengasuhan anak		1) Penelitian di 69 negara menyebutkan bahwa peran ibu dalam melakukan aktivitas stimulasi pada AUD jauh lebih banyak dibandingkan peran ayah 2) Beberapa negara membuat kebijakan cuti untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan	Sebanyak 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah.	1) Adanya persepsi di masyarakat bahwa tugas ayah adalah bekerja dan memenuhi kebutuhan materi keluarga 2) Rendahnya partisipasi ayah dalam pengasuhan anak 3) Hanya 3% capaian target ayah yang mengikuti Kelas BKB Emas	Peningkatan peran ayah dalam pengasuhan anak

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Adanya sejumlah 12 Taman Penitipan Anak (TPA) di Kabupaten Magetan yang telah teregistrasi di Pusat (Kemendukbangga/BKKBN)	Masih Rendahnya kualitas Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)		1) Sebanyak 40% anak di dunia tidak memiliki akses ke pengasuhan anak yang berkualitas 2) Tingginya kebutuhan layanan pengasuhan anak namun kualitas saat ini masih rendah	1) Persepsi masyarakat terkait pentingnya TPA yaitu 30,5% sangat penting dan 32,4% penting 2) 25,6% responden suatu studi berharap adanya perbaikan kualitas pengasuhan di TPA	1) Hanya 8,33% TPA yang memenuhi 4 Pilar TAMASYA 2) Hanya 15,2% pengasuh di TPA yang berminat mengikuti peningkatan kompetensi	Peningkatan kualitas Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya)
Adanya Program Asuh Balita Stunting untuk Wujudkan Generasi Magetan Berkualitas (Anting Emas) yang dapat disinergikan dengan Program GENTING	Rendahnya peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting (GENTING)		Pada Tahun 2024, terdapat sejumlah 150,2 juta balita yang stunting (terlalu pendek untuk usianya) dan 23,2% dari seluruh balita di dunia mengalami stunting (WHO, 2024)	Prevalensi stunting di Indonesia hanya menurun sebesar 1,7% berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 sebesar 21,5% dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 sebesar 19,8%	Menurut hasil SSGI Tahun 2024 prevalensi stunting di Jawa Timur sebesar 14,7% dan di Kabupaten Magetan sebesar 10,3%	Peningkatan peran orang tua asuh dalam pencegahan stunting
Terbentuknya sejumlah 181 Kelompok UPPKA di Kabupaten Magetan	Rendahnya partisipasi akseptor dalam Kelompok UPPKA		Persentase wanita di dunia yang memperoleh peluang ekonomi baru sebesar 46%	1) Masih rendahnya minat dan semangat akseptor untuk berwirausaha dan mengembangkan ekonomi produktif 2) Kurangnya	1) Masih rendahnya persentase Kelompok UPPKA yang memiliki NIB (38,67%) 2) Masih rendahnya persentase Kelompok UPPKA yang terdaftar	Peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
				keterlibatan mitra kerja dalam pengembangan usaha kelompok UPPKA	di YO SAKURGA (6,08%)	
Upaya Advokasi dan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Masih Rendahnya Pemahaman pemangku kebijakan dalam menyikapi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)		sekitar 1 dari 3 perempuan telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual	Masih Tingginya Angka Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Masih adanya Kasus Kekerasan Perempuan dan anak dengan Kualitas yang memprihatinkan	Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Masih Belum terwujudnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		Kesetaraan Gender	Ketimpangan Gender	Pengarusutamaan Gender masih dipahami sebatas laki-laki dan perempuan	Pengarusutamaan Gender (PUG)
Penyusunan Peraturan Daerah serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak	Belum adanya Peraturan Daerah yang menekan Pernikahan Usia Anak		Pelanggaran Hak Anak dan Hak Asasi Manusia	masih tingginya pernikahan anak	Usia Pemohon Dispensasi kawin anak semakin memprihatinkan	Pernikahan Anak

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kerjasama dengan Jejaring melakukan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Belum Optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		Konvensi Hak Anak belum berjalan sebagaimana mestinya anak harus terlindungi dan anak berhak atas perkembangan fisik dan mental yang sehat	Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hanya	Praktik pengasuhan anak di beberapa keluarga masih dipengaruhi oleh stereotip gender tradisional.	Pemenuhan Hak Anak

**BAB. III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Dinas PPKB PP dan PA selaku pelaksana Pemerintah Daerah memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu yaitu urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan program/kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

**MAGETAN NYAMAN**, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

**MAGETAN MAJU**, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**MAGETAN BERKELANJUTAN**, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Adapun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Magetan yang Nyaman, Maju dan Sejahtera berikut merupakan Tujuh (7) Misi Pembangunan (SAPTA KARSA) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan
5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran
6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah
7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyub Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah. Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

<b>VISI</b>	<b>"MAGETAN NYAMAN MAJU DAN BERKELANJUTAN"</b>	
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1. SDM ANDAL - Membangun Sumber Daya Manusia yang Andal dan Berdaya Saing KuaT 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyup Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	1. Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis	1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 4. Terciptanya Kerukunan dan Kegotongroyongan dalam Keberagaman Sosial Budaya Masyarakat
2. KOMODITAS UNGGUL - Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan 5. EKONOMI KUAT - Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran 6. INFRASTRUKTUR MANTAP - Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah 7. MAGETAN HARMONIS - Membangun Kehidupan Masyarakat yang “Guyup Rukun”, Aman, Tenteram berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau	2. Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan Investasi Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah 3. Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Berkelanjutan 5. Menurunnya Angka Pengangguran melalui Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan 6. Menurunnya Tingkat Resiko Bencana
3. BIROKRASI TANGGAP - Membangun Birokrasi Pemerintahan yang	3. Terciptanya Birokrasi Pemerintahan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	yang Profesional, Adaptif dan Transparan	2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik
		4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5. Meningkatnya Kualitas ASN
		6. Meningkatnya Daya Saing dan Inovasi Daerah
4. MASYARAKAT SEJAHTERA - Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan	4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat 2. Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas PPKB PP dan PA memiliki peran untuk mendukung suksesnya misi ke-1 dengan tujuan “Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis” dan misi ke-4 dengan tujuan “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran Dinas PPKB PP dan PA beserta target selama periode Renstra 2025-2029. Dalam hal ini tujuan yang akan dicapai oleh Dinas PPKB PP dan PA adalah “Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan”.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran beserta indikator kinerjanya yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	TARGET					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>NSPK :</b> Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  <b>Sasaran RPJMD yang Relevan :</b> Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	-	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)    Angka	72,1	72,2	72,3	72,4	72,5	IKD
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)    Angka	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	IKD
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)    Angka	66,2	66,4	66,6	66,8	67	IKD
<b>NSPK :</b> Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  <b>Sasaran RPJMD yang Relevan :</b> Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)    Angka	0,161	0,156	0,151	0,147	0,142	IKD
		Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT    Angka	0,0131	0,0126	0,0121	0,0116	0,0111	IKU
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)    Skor	725	750	775	800	825	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	Nilai SAKIP    Skor	94,85	94,86	94,87	94,88	94,89	IKU

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	TARGET					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat     Angka	84,5	84,7	85	85,3	85,5	IKU

### 3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Adapun strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam mencapai sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan dalam mendukung program Bangga Kencana	Penguatan jejaring layanan KB melalui kerja sama lintas sektor untuk dukungan tenaga medis terlatih pada pelayanan kontrasepsi	Peningkatan kualitas dan validitas data keluarga beserta pengelolaan serta updating datanya	Mendorong pemanfaatan data keluarga kepada para stakeholder	Pengembangan integrasi pendidikan berbasis kependudukan
Peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pembinaan dan peningkatan Tribina (BKB, BKL dan BKR)	Peningkatan pendewasaan usia perkawinan melalui pembinaan Insan GenRe	Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan kelompok UPPKA	Peningkatan kualitas pola asuh terhadap anak melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)	Peningkatan ketahanan dan pembangunan keluarga
Peningkatan Layanan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan melalui Pembagunan UPTD PPA beserta perlengkapannya	Peningkatan kompetensi SDM yang melakukan pendampingan dan layanan pada penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan PERDA Perkawinan Anak	Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta rencana aksi pengarusutamaan gender	Peningkatan pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan adalah pedoman atau prioritas kerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui perumusan arah kebijakan yang sistematis ini diharapkan dapat menghasilkan Renstra PD yang koheren, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan yang tepat akan menjadi fondasi yang kuat bagi

pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029, serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

Arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Jumlah Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Kependudukan untuk mendukung program Bangga Kencana</li> <li>- Meningkatkan kompetensi tenaga lini lapangan dan integrasi dan penanaman nilai program Bangga Kencana ke dalam lembaga/institusi dan masyarakat, serta memaksimalkan penggunaan media KIE agar seluruh program Bangga Kencana dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran</li> <li>- Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas melalui koordinasi dan kerja sama dengan faskes, Dinkes, dan perangkat daerah lain, termasuk promosi KB jangka panjang dan dukungan tenaga terlatih</li> </ul>	
		Perluasan upaya promotif-preventif melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan budaya berolahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kesadaran pemeriksaan kesehatan reproduksi melalui kerja sama dengan perangkat daerah lain, kampanye lintas sektor, dan integrasi data hasil pemeriksaan ke perencanaan program KB</li> </ul>	
		Peningkatan keluarga berkualitas, ketahanan keluarga, dan kualitas penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana kerja bagi Kader Bina Keluarga dan peningkatan kualitas pembinaan dan kompetensi bagi Kader-Kader Bina Keluarga</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga</li> <li>- Meningkatnya kualitas pengasuhan di Taman Penitipan Anak (TPA)</li> </ul>	

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan partisipasi ayah dalam pengasuhan</li> <li>- Meningkatkan partisipasi mitra/stakeholder dalam Program GENTING</li> </ul>	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan); Peningkatan Pemberdayaan Perempuan  Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemahaman dan implementasi pengarusutamaan gender</li> <li>- Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan</li> <li>- Peningkatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak serta layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>- Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</li> </ul>	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PERNYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel 4.1  
Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Perangkat Daerah

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
	Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk			Total Fertility Rate (TFR)		
			Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran		(1) Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Spesific Fertility Rate/ASFR) kelompok usia 15-19 tahun (2) Jumlah lembaga yang memanfaatkan data keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		(1) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR) (2) Unmeet Need (3) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal Yang dilaksanakan	
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan ALOKON serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	Pelaksanaan dan Pengolahan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
		Meningkatnya Pembangunan Keluarga			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	
					Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		1. Persentase ARG Daerah; 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Jumlah Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				Kemasyarakatan			
					jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak			Rasio KDRT		
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak		Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Laporan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi		1. Presentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif;	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
			anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
				Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Dokumen Laporan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak			Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Laporan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			Nilai SAKIP		
					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Dinas		1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan; 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				Terkelolanya Barang Milik Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>KET</b>
				Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

#### **4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA NOMENKLATUR**

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk lima tahun ke depan maka ditetapkanlah pagu anggaran dan target anggaran yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK														
OUTCOME: Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran	"(1) Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur Ibu (Age Specific Fertility Rate/ASFR) kelompok usia 15-19 tahun    Angka	(1) 9,3 (2) 1	(1) 9,3 (2) 2	(1) 9,29 (2) 2	745.010.400	(1) 9,28 (2) 2	775.010.400	(1) 9,27 (2) 3	795.010.400	(1) 9,26 (2) 3	815.010.400	(1) 9,25 (2) 3	825.010.400	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kot a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
OUTPUT : Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian		1 Kegiatan	1 Laporan	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	145.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	155.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Kuantitas Penduduk															
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Pertemuan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal    Kegiatan														
OUTPUT: Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal		—	—	2 Satuan Pendidikan	120.000.000	3 Satuan Pendidikan	135.000.000	3 Satuan Pendidikan	145.000.000	4 Satuan Pendidikan	150.000.000	4 Satuan Pendidikan	155.000.000		
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Kabupaten/Kota	Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal    Satuan Pendidikan														
OUTPUT: Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	625.010.400	1 Dokumen	640.010.400	1 Dokumen	650.010.400	1 Dokumen	665.010.400	1 Dokumen	670.010.400		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan    Dokumen														
OUTPUT: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.999.200	1 Laporan	59.999.200	1 Laporan	59.999.200	1 Laporan	59.999.200	1 Laporan	59.999.200		
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Keluarga    Laporan													
OUTPUT: Tersedianya Data dan Informasi Keluarga		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
OUTPUT: Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya    Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	155.000.000	1 Laporan	155.000.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
OUTPUT: Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga    Laporan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	275.011.200	12 Dokumen	275.011.200	12 Dokumen	275.011.200	12 Dokumen	275.011.200	12 Dokumen	275.011.200	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat integrasi Program Bangsa														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Kencana di Sektor Lain															
OUTPUT: Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   Dokumen	50 Unit	24 Unit	50 Unit	75.000.000	50 Unit	85.000.000	55 Unit	90.000.000	55 Unit	100.000.000	60 Unit	100.000.000		
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
OUTCOME: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	(1) 72,4 % (2) 7,62 % (3) 73 %	(1) 72,6 % (2) 7,7 % (3) 75 %	(1) 73 % (2) 7,69 % (3) 77 %	4.702.944.600	(1) 73,4 % (2) 7,68 % (3) 79 %	4.774.194.600	(1) 73,7 % (2) 7,67 % (3) 81 %	4.769.194.600	(1) 73,9 % (2) 7,66 % (3) 83 %	4.811.694.600	(1) 74 % (2) 7,65 % (3) 85 %	4.849.194.600		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk    Unit													
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal														
OUTPUT: Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	“(1) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)    %	4 Paket	1 Dokumen	4 Paket	1.287.315.000	4 Paket	1.297.315.000	4 Paket	1.307.315.000	4 Paket	1.319.815.000	4 Paket	1.327.315.000	
Pengendalian Program KKBPK														
OUTPUT: Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK		1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	27.500.000	1 Laporan	30.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana														
OUTPUT: Terkelolanya Operasional dan		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	481.860.000	10 Laporan	481.860.000	10 Laporan	481.860.000	10 Laporan	481.860.000	10 Laporan	481.860.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang    Paket														
OUTPUT: Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa		10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	355.455.000	10 Laporan	355.455.000	10 Laporan	355.455.000	10 Laporan	355.455.000	10 Laporan	355.455.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang															
OUTPUT: Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK    Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000		
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
sesuai Kearifan Budaya Lokal															
OUTPUT: Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)    Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000		
Advokasi Program KKBPK oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja															
OUTPUT: Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		29 Organisasi	29 Organisasi	29 Organisasi	250.000.000	29 Organisasi	250.000.000	29 Organisasi	250.000.000	29 Organisasi	250.000.000	29 Organisasi	250.000.000		
Pendayagunaan Tenaga	Jumlah Laporan Mekanisme														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)     Laporan														
OUTPUT: Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		100%	100%	100%	1.098.750.000	100%	1.150.000.000	100%	1.120.000.000	100%	1.135.000.000	100%	1.150.000.000		
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
	dan Elektronik serta Media Luar Ruang    Dokumen														
OUTPUT: Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1378 Orang	1378 Orang	1378 Orang	1.098.750.000	1378 Orang	1.150.000.000	1378 Orang	1.120.000.000	1378 Orang	1.135.000.000	1378 Orang	1.150.000.000		
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan    Dokumen														
OUTPUT: Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan ALOKON serta Pelaksanaan Pelayanan KB		100%	100%	100%	1.616.879.600	100%	1.626.879.600	100%	1.641.879.600	100%	1.656.879.600	100%	1.671.879.600		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja    Organisasi														
OUTPUT: Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.903.800	12 Laporan	14.903.800	12 Laporan	14.903.800	12 Laporan	14.903.800	12 Laporan	14.903.800		
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Prosentase Pembinaan Pendayagunaan oleh PKB/PLKB di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB    %														
OUTPUT: Terwujudnya Peningkatan Kesertaan		2604 Orang	2604 Orang	2604 Orang	1.394.374.000	2604 Orang	1.394.374.000	2604 Orang	1.394.374.000	2604 Orang	1.394.374.000	2604 Orang	1.394.374.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)    Orang														
OUTPUT: Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	30.000.000	25 Laporan	35.000.000	25 Laporan	40.000.000	30 Laporan	45.000.000	30 Laporan	50.000.000		
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Cakupan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan    %														
OUTPUT: Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		829 Orang	829 Orang	829 Orang	145.000.000	829 Orang	150.000.000	829 Orang	160.000.000	835 Orang	170.000.000	835 Orang	180.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya    Laporan														
OUTPUT: Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	32.601.800	2 Laporan	32.601.800	2 Laporan	32.601.800	2 Laporan	32.601.800	2 Laporan	32.601.800		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
OUTPUT: Terlaksananya Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)    Orang	100%	100%	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
OUTPUT: Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung		49 Kampung	49 Kampung	125 Kampung	700.000.000	125 Kampung	700.000.000	125 Kampung	700.000.000	125 Kampung	700.000.000	125 Kampung	700.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Keluarga Berkualitas															
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP    Laporan														
OUTCOME: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		73%	73%	73,50%	4.480.050.000	73,70%	4.515.050.000	74,00%	4.555.050.000	74,20%	4.595.050.000	74,50%	4.615.050.000		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
OUTPUT: Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB    Orang	73%	73%	73,20%	994.450.000	73,40%	1.019.450.000	73,60%	1.049.450.000	73,80%	1.079.450.000	74,00%	1.089.450.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
OUTPUT: Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya    Laporan	200 Keluarga	200 Keluarga	200 Keluarga	40.000.000	200 Keluarga	45.000.000	200 Keluarga	50.000.000	200 Keluarga	55.000.000	200 Keluarga	60.000.000	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
OUTPUT: Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta	8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	133.200.000	8 Laporan / Dokumen	133.200.000	8 Laporan / Dokumen	133.200.000	8 Laporan / Dokumen	133.200.000	8 Laporan / Dokumen	133.200.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB    %													
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
OUTPUT: Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)    Kampung	10 Laporan	5 Laporan	10 Laporan	341.250.000	10 Laporan	341.250.000	10 Laporan	341.250.000	10 Laporan	341.250.000	10 Laporan	341.250.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
OUTPUT: Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kegiatan Ketahanan Keluarga    %	20 Unit	13 Unit	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	10 Unit	130.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi															
OUTPUT: Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Prosentase Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga    %	235 Orang	235 Orang	235 Orang	150.000.000	235 Orang	160.000.000	235 Orang	170.000.000	235 Orang	180.000.000	235 Orang	185.000.000		
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)															
OUTPUT: Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas    Keluarga	8 Kelompok	8 Kelompok	6 Kelompok	200.000.000	6 Kelompok	210.000.000	7 Kelompok	225.000.000	8 Kelompok	240.000.000	8 Kelompok	240.000.000		
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
OUTPUT: Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)    Laporan/Dokumen	75%	75%	75,20%	3.485.600.000	75,40%	3.495.600.000	75,60%	3.505.600.000	75,80%	3.515.600.000	76,00%	3.525.600.000	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/ Kelahiran, Baduta/ Balita)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
OUTPUT: Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)     Laporan	10 Laporan	10 laporan	10 Laporan	1.548.000.000	10 Laporan	1.548.000.000	10 Laporan	1.548.000.000	10 Laporan	1.548.000.000	10 Laporan	1.548.000.000	
Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran , Baduta/Balita)														
OUTPUT: Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	10 Laporan	10 laporan	10 Laporan	1.857.600.000	10 Laporan	1.857.600.000	10 Laporan	1.857.600.000	10 Laporan	1.857.600.000	10 Laporan	1.857.600.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia    Unit														
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga															
OUTPUT: Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan    Orang	—	—	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	55.000.000	6 Laporan	60.000.000	8 Laporan	65.000.000	8 Laporan	70.000.000		
Promosi dan Sosialisasi Program															

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Pembangunan Keluarga															
OUTPUT: Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga		—	—	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	35.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	50.000.000		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk     Kelompok														
OUTCOME: Meningkatnya kualitas dan efektivitas		47,24%; 68,12	48,5%; 68,68	50 %; 69,24	145.000.000	52%; 69,8	170.000.000	54%; 70,37	185.000.000	57%; 70,93	200.000.000	60%; 71,49	215.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan															
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a	Prosentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga     %														
OUTPUT: Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	65.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)    Laporan													
OUTPUT: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kot a		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	65.000.000	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan    Laporan													
OUTPUT: Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,		1 Kegiatan	2 Dokumen	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	1 Kegiatan	140.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat															
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga    Laporan														
OUTPUT: Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		—	—	100 Orang	100.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	130.000.000	100 Orang	140.000.000	100 Orang	150.000.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga    Laporan														
OUTCOME: Meningkatnya		100%	100%	100 %	300.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	345.000.000	100%	350.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
pengecahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak															
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	1. Persentase ARG Daerah    % 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan    %														
OUTPUT: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia		1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	340.000.000	1 Laporan	345.000.000	1 Laporan	350.000.000		
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Laporan    Dokumen														
OUTPUT: Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan		—	—	1 Lembaga	300.000.000	1 Lembaga	320.000.000	1 Lembaga	340.000.000	1 Lembaga	345.000.000	1 Lembaga	350.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota    Dokumen														
OUTCOME: Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan		(1) 100% (2) 67,80	100%	(1) 100% (2) 68,540	190.000.000	(1) 100% (2) 68,910	210.000.000	(1) 100% (2) 69,280	235.000.000	(1) 100% (2) 69,650	260.000.000	(1) 100% (2) 70,020	280.000.000		
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan    Kegiatan														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
OUTPUT: Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak		1 Laporan	1 Kegiatan	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	235.000.000	1 Laporan	260.000.000	1 Laporan	280.000.000	
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi    Orang													
OUTPUT: Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota		—	—	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	1 Kegiatan	140.000.000	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	160.000.000	
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
	yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif    %														
OUTPUT: Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kot a		—	—	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000		
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Dokumen Laporan    Laporan														
OUTCOME: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		66,15	65,3	65,35	200.000.000	65,40	220.000.000	65,45	235.000.000	65,50	245.000.000	65,55	250.000.000		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPLA) Kabupaten/Kot a	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)    Lembaga														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
OUTPUT: Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		1 Laporan	—	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	235.000.000	1 Laporan	245.000.000	1 Laporan	250.000.000	
Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	"1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan Pelayanan Komprehensif    %													
OUTPUT: Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan		—	—	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	235.000.000	1 Laporan	245.000.000	1 Laporan	250.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Kabupaten/Kota															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
OUTCOME: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Birokrasi yang Profesional Serta Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Efisien pada Perangkat Daerah Pengampu Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Laporan    Laporan	(1) 80.50 (2) 88,44	(1) 80.60 (2) 89	(1) 80.70 (2) 90.00	5.202.009.885	(1) 80,8 (2) 90.30	5.554.500.000	(1) 80,9 (2) 90.50	5.721.500.000	(1) 81 (2) 90.80	5.965.000.000	(1) 81,1 (2) 91.00	6.253.000.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
OUTPUT: Terlaksananya	Jumlah pengambil	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	103.675.400	14 Dokumen	115.000.000	14 Dokumen	125.000.000	14 Dokumen	135.000.000	14 Dokumen	140.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota    Kegiatan														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
OUTPUT: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota    Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000	8 Dokumen	35.000.000	8 Dokumen	40.000.000	8 Dokumen	45.000.000	8 Dokumen	50.000.000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
OUTPUT: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)    Angka	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	73.675.400	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	85.000.000	6 Laporan	90.000.000	6 Laporan	90.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
OUTPUT: Terkelolanya Administrasi	Jumlah Dokumen	88,40%	87%	87%	3.232.064.485	89%	3.830.000.000	90%	3.935.000.000	91%	4.038.000.000	91%	4.240.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Kuangan Perangkat Daerah	Laporan    Laporan													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
OUTPUT: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota    Laporan	308 Orang/bulan	270 Orang/bulan	260 Orang/bulan	3.191.364.485	260 Orang/bulan	3.800.000.000	260 Orang/bulan	3.900.000.000	260 Orang/bulan	4.000.000.000	260 Orang/bulan	4.200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
OUTPUT: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan    Angka 2. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran    %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	40.700.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	38.000.000	2 Laporan	40.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD														
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTPUT:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu    Dokumen													
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTPUT:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah    Dokumen													
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
OUTPUT: Terkelolanya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Paket	12 Paket	12 Paket	545.381.950	12 Paket	514.500.000	12 Paket	486.500.000	12 Paket	555.500.000	12 Paket	573.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perangkat Daerah    Laporan													
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
OUTPUT: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15.000.000	12 Paket	17.000.000	12 Paket	18.500.000	12 Paket	19.000.000	12 Paket	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
OUTPUT: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    Orang/bulan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	350.361.950	12 Paket	300.000.000	12 Paket	250.000.000	12 Paket	300.000.000	12 Paket	300.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
OUTPUT: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	23.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	32.500.000	12 Paket	35.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    Laporan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah														
OUTPUT: Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Paket	12 Paket	12 Paket	25.000.000	12 Paket	27.500.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	32.000.000	12 Paket	35.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
OUTPUT: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	18.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	22.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan															
OUTPUT: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.020.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	6.000.000	12 Dokumen	7.000.000	12 Dokumen	8.000.000		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Daerah    Paket													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
OUTPUT: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	140.000.000	12 Laporan	150.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
OUTPUT: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.043.275.900	12 Laporan	840.000.000	12 Laporan	900.000.000	12 Laporan	947.500.000	12 Laporan	1.000.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
OUTPUT: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan    Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	97.500.000	12 Laporan	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
OUTPUT: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    Paket	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	963.275.900	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	850.000.000	12 Laporan	900.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
OUTPUT: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    Paket	145 Unit	146 Unit	145 Unit	277.612.150	145 Unit	255.000.000	145 Unit	275.000.000	145 Unit	289.000.000	145 Unit	300.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
OUTPUT: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	7 Unit	3 Unit	7 Unit	92.912.150	7 Unit	100.000.000	7 Unit	110.000.000	7 Unit	120.000.000	7 Unit	125.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Undangan yang Disediakan    Dokumen													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
OUTPUT: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    Laporan	137 Unit	142 Unit	137 Unit	72.700.000	137 Unit	75.000.000	137 Unit	80.000.000	137 Unit	85.000.000	137 Unit	90.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
OUTPUT: Terlaksananya	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	112.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	85.000.000	1 Unit	84.000.000	1 Unit	85.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KEGIATAN/ SUB- KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan														
TOTAL					15.220.004.485		15.763.744.600		16.040.744.600		16.421.744.600		16.812.244.600		

#### 4.3 SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PRIORITY PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2025-2029, Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan mempunyai peran untuk mensukseskan misi ke-1 dengan tujuan “Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis” dan misi ke- 4 dengan tujuan “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat” yang selanjutnya diturunkan ke tujuan dan sasaran Dinas PPKB PP dan PA. Untuk memfokuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Magetan maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu kependudukan dalam rangka mendukung pengendalian angka kelahiran	<p><b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk</b></p> <p>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal</p> <p><b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</p> <p>Penyediaan Data dan Informasi Keluarga</p> <p>Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</p> <p>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</p> <p>Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain</p>	Mendukung tujuan RPJMD "Terwujudnya SDM Unggul, Berdaya Saing dan Harmonis" dan sasaran "Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan"
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan	<p><b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b></p> <p>Pengendalian Program KKBPK</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
		Keluarga Berencana (KB)	<p>Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana</p> <p>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</p> <p>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang</p> <p>Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal Yang dilaksanakan</p> <p>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</p> <p><b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b></p> <p>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</p> <p><b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> <p>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</p> <p>Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</p> <p>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya</p> <p><b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b></p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			<p>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Pelaksanaan dan Pengolahan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas</p>	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	<p><b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p> <p>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</p> <p>Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</p> <p>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p> <p>Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi</p> <p>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina</p> <p><b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b></p> <p>Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)</p> <p>Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	
			Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	
4	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggara an PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	<p><b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</p> <p><b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	Mendukung tujuan RPJMD "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat" dan sasaran "Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat"
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak	<p><b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kerentanan dan risiko kekerasan	<p><b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b></p> <p>Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	<p><b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b></p> <p>monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	

#### 4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Bagian penting dalam proses Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan, Perangkat Daerah menetapkan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD dilakukan secara spesifik melalui IKU. Indikator-indikator yang disajikan merupakan hasil seleksi yang cermat, dirancang untuk secara langsung merefleksikan kemajuan dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKU menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas Renstra PD.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,0	66,2	66,4	66,6	66,8	67
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,168	0,166	0,164	0,162	0,16	0,158
4	Rasio KDRT	Angka	0,0136	0,0131	0,0126	0,0121	0,0116	0,0111
5	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	700	725	750	775	800	825
6	Nilai SAKIP	Skor	94,83	94,85	94,86	94,87	94,88	94,89
7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	84	84,5	84,7	85	85,3	85,5

Tabel 4.5  
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN
1.	Total Fertility Rate (TFR)	<p>Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya</p> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p><math>i</math> = Kelompok Umur (15-19) Tahun s/d (45-49) Tahun  <math>ASFR_i</math> = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita ke <math>i</math></p>
2.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia</p> $iBangga = \frac{1}{3} \times (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan Keluarga}) \times 100$
3.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	<p>IKG (Indeks Ketimpangan Gender) adalah sebuah indeks yang mengukur tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan politik), dan partisipasi di pasar tenaga kerja.</p> <p>Indeks Perempuan :</p> $G_F = \sqrt[3]{\left(\frac{0,01}{Faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot SE_F)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_F}$ <p>Indeks Laki-Laki :</p> $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot TPAK_M}$ <p>Agregasi Indeks Perempuan dan Laki-Laki :</p> $HARM(G_F, G_M) = \left[\frac{(G_F)^{-1} + (G_M)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ <p>Indeks Kesehatan :</p> $Kesehatan = \frac{(\sqrt{\frac{0,01}{Faskes} \cdot \frac{0,01}{ULP}} + 1)}{2}$ <p>Indeks Pemberdayaan :</p> $Pemberdayaan = \frac{\sqrt{PR_F \cdot SE_F} + \sqrt{PR_M \cdot SE_M}}{2}$ <p>Indeks Pasar Tenaga Kerja :</p> $IPK = \frac{TPAK_F + TPAK_M}{2}$ <p>Indeks Seluruh Dimensi :</p> $G_{F,M} = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN
		<p>Indeks Kesetaraan Gender :</p> $\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ <p>Indeks Ketimpangan Gender :</p> $IKG = 1 - \frac{HARM(G_F, G_M)}{G_{F,M}}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>G_F</math> : Indeks Perempuan</p> <p><math>G_M</math> : Indeks Laki-laki</p> <p>Faskes : Proporsi persalinan yang tidak di fasilitas kesehatan</p> <p>ULP : Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</p> <p><math>PR_F</math> : Persentase perempuan yang duduk di parlemen</p> <p><math>PR_M</math> : Persentase laki-laki yang duduk di parlemen</p> <p><math>SE_F</math> : Persentase perempuan pendidikan minimal SMA</p> <p><math>SE_M</math> : Persentase laki-laki pendidikan minimal SMA</p> <p><math>TPAK_F</math> : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</p> <p><math>TPAK_M</math> : Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</p> <p>Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi</p> <p>Pemberdayaan : Indeks pemberdayaan</p> <p>IPK : Indeks pasar kerja</p> <p><math>G_{F,M}</math> : Indeks dimensi</p>
4.	Rasio KDRT	$\text{Rasio KDRT} = \frac{\text{Jumlah Kasus KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$ <p>Kriteria korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah seseorang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dilakukan oleh anggota pasangan keluarga atau orang terdekat (misalnya, pasangan, ayah, ibu, atau anak nenek kakek asisten dst) dan menyebabkan dampak seperti luka fisik, trauma psikologis, rasa takut, tidak berdaya, atau kehilangan kemandirian ekonomi</p>

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN
5.	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	<p>Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah proses evaluasi atau peninjauan terhadap implementasi indikator-indikator KLA untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil membangun sistem berbasis hak anak</p> <p>Total Skor KLA terdiri dari unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan</li> <li>2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan</li> <li>3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</li> <li>4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</li> <li>5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya</li> <li>6. Klaster V : Perlindungan Khusus</li> <li>7. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan</li> </ol>
6.	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bobot 30 komponen perencanaan</li> <li>- Bobot 30 komponen pengukuran kinerja</li> <li>- Bobot 15 komponen pelaporan kinerja</li> <li>- Bobot 25 komponen evaluasi</li> </ul> <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah</li> <li>2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)</li> <li>3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ol> <p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran kinerja telah dilakukan</li> <li>2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</li> <li>3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</li> </ol> <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika</li> <li>2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap</li> <li>3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan</li> <li>4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya</li> </ol> <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan dokumen SAKIP</li> <li>2. Keselarasan dokumen perencanaan</li> <li>3. Ketercapaian Kinerja</li> <li>4. LHE ditindaklanjuti</li> <li>5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE</li> <li>6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya</li> </ol>
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = <math>\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25</math></p>

No	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA PERHITUNGAN
		9 parameter IKM : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem mekanisme dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>

#### 4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK fokus pada aspek-aspek kunci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Penetapan target IKK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap urusan dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,37	94,67	94,97	95,27	95,57	95,87	96,17	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,178	0,168	0,166	0,164	0,162	0,16	0,158	
3	Persentase ARG Daerah	%	47,24	48,50	50,00	52,00	54,00	57,00	60,00	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	1,99	1,98	1,97	1,96	1,95	1,94	1,93	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	72,15	72,6	73	73,4	73,7	73,9	74	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Angka	7,70	7,70	7,69	7,68	7,67	7,66	7,65	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	9,3	9,30	9,29	9,28	9,27	9,26	9,25	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	65,93	66	66,2	66,4	66,6	66,8	67	
6	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	89,1	90,41 %	90,47 %	90,53 %	90,57 %	90,61 %	90,63 %	
7	Persentase Kehamilan yang Tidak Direncanakan (KTD)	%	5,4	5,27	5,14	5,01	4,88	4,81	4,75	
8	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Angka	86,2	86,31	86,44	86,57	86,7	86,83	86,96	
9	Indeks Lansia Berdaya	Angka	57,6	57,68	57,76	57,84	57,92	58	58,08	
10	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	%	73	75	77	79	81	83	85	

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan semua program/kegiatan/sub kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahun sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, 18 Desember 2025

Plt. KEPALA DINAS PPKB PP DAN PA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. BENNY ADRIAN, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740803 199311 1 002